

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(STUDI KASUS DI DESA KAHAKAN KECAMATAN BATU BENAWA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

Nourlaila¹, Junaidy², Lieta Dwi Novianti³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIM19120308

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 11NIDN02088702

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1126117402

E-mail : nourlaila171@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan 6 orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan memberikan analisis gambaran secara terperinci berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan dengan baik apabila hal tersebut dilihat dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 133 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun jika Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan alokasi dana desa (ADD) yang belum tercapai sepenuhnya.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the description of the Implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Kahakan Village, Batu Benawa District, Hulu Sungai Tengah Regency. The method in this research uses a qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Data collected using interview techniques with 6 informants. The sample was determined using interview, observation and documentation techniques. Data analysis uses qualitative descriptive techniques by providing a detailed description analysis based on the facts found in the field. The results of this study indicate that the Implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Kahakan Village, Batu Benawa Subdistrict, Hulu Sungai Tengah Regency has gone well if it is seen from village financial management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 133 of 2014 and Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. However, if the Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy is seen based on the theory of George C. Edward III theory has not been running optimally because there are still several obstacles that affect the policy implementation process and the achievement of the objectives of the allocation of village funds (ADD) that have not been fully achieved.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Policy Implementation

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, d. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan*. Jakarta: LIPI Press.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

I. Jurnal

- Arifiyanto, F. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Asih, S. d. (2019). Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Hariadi, M. d. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan di Desa Pandangan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*.
- Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*.
- Hayati, R. (2020). Implementation of Village Fund Allocation Policy to Development in Garagata Village District Jaro District Tabalong District. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*.
- Ibty, R. M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika*.
- Magdalena, B. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Ternggarong Seberang Kabupaten Kutai KartaNegara. *Jurnal Administrative Reform*.
- Mahyuni, A. R. (2021). Implementasi Kebijakan Dana dan Konflik Sosial : Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- Permana, I. J. (2012). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*.
- Rantung, M. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wahyuddin (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa AKO Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada Bab V kesatu pada pasal 20 dijeaskan menengenai Perencanaan dalam APBDes
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab V baian ke satu pasal 2
- Wati, Isra. 2020. *Implmentasi Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Kausus Desa Rembitan Kecanatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*

Rahmadan, Ni'ma. 2021. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara*

Bali antar News, 2018. <https://bali.antarnews.com/berita/138158/icw-kasus-korupsi-dan-dana-desa-terbanyak-sepanjang-2018> tanggal 28 februari 2023 Jam 19.00 WITA

Databks,2022.<https://databoks.katadata.o.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>